

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai hubungan antara usaha dan kebijakan yang bertujuan agar dapat meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran struktur ekonomi yang paling tepat dengan karakteristik daerah masing-masing (BPS, 2008).

Menurut Todaro (1998), keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih. Kesimpulan tersebut akhirnya memberikan tujuan bahwa pembangunan bukan hanya sekedar menaikkan PDB atau PDRB saja, tapi lebih diartikan sebagai kegiatan untuk mengembangkan ekonomi, pemerataan dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan ekonomi berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan dilakukan pembangunan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dan juga sebaliknya, adanya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Putra, 2018).

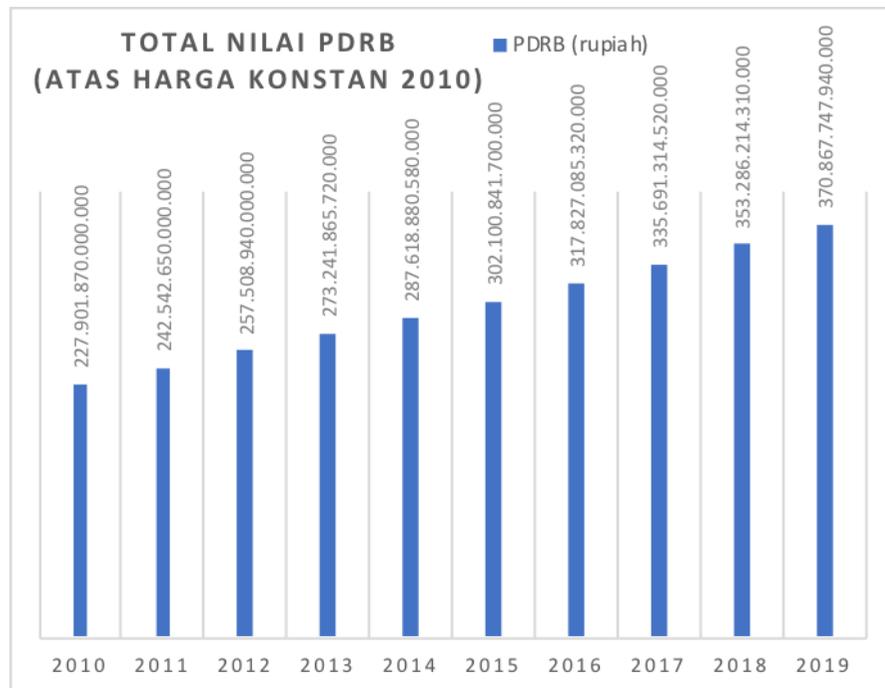
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah sendiri diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana indikator tersebut penting untuk mengetahui kondisi ekonomi daerah dalam periode tertentu.

PDRB diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di daerah atau jumlah suatu nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh unit ekonomi di suatu daerah, baik itu berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS, 2016).

PDRB memiliki dua dasar macam harga yang berkaitan dalam nilainya, yang pertama atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah suatu barang dan jasa dihitung dengan menggunakan harga pada tahun yang sedang berjalan. Tujuannya untuk mengetahui baik itu kemampuan sumber daya ekonomi, struktur atau pergeseran ekonomi dalam suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selain itu untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (BPS, 2016).

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan menduduki urutan keempat dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sebanyak 34 Provinsi yang ada di Indonesia, setiap daerah memiliki perbedaan baik itu dalam segi pendapatannya, pengeluarannya, ketenagakerjaan hingga kebijakan pemerintah daerah guna mencapai pembangunan ekonomi yang merata. Diantara beberapa pulau yang ada di Indonesia, Pulau Kalimantan menduduki urutan keempat sebagai jumlah penduduk terbanyak dimana urutan ketiga dimiliki oleh Pulau Sulawesi.

Pulau Kalimantan memiliki lima provinsi yang diantaranya ialah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa provinsi yang ada di Kalimantan seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat menjadi pilihan penulis untuk diteliti, karena di provinsi tersebut mengalami peningkatan dan penurunan pada pertumbuhan ekonominya yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, tiga provinsi tersebut cukup berbeda atau agak terlambat dari segi pertumbuhan ekonominya. Sedangkan apabila penulis menambahkan Provinsi Kalimantan Utara agar diteliti, cukup menyulitkan penulis karena data yang diperlukan terbatas dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara sendiri belum terlalu lama dibentuk, yang asal muasalnya bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: Data diolah, 2020

GAMBAR 1.1

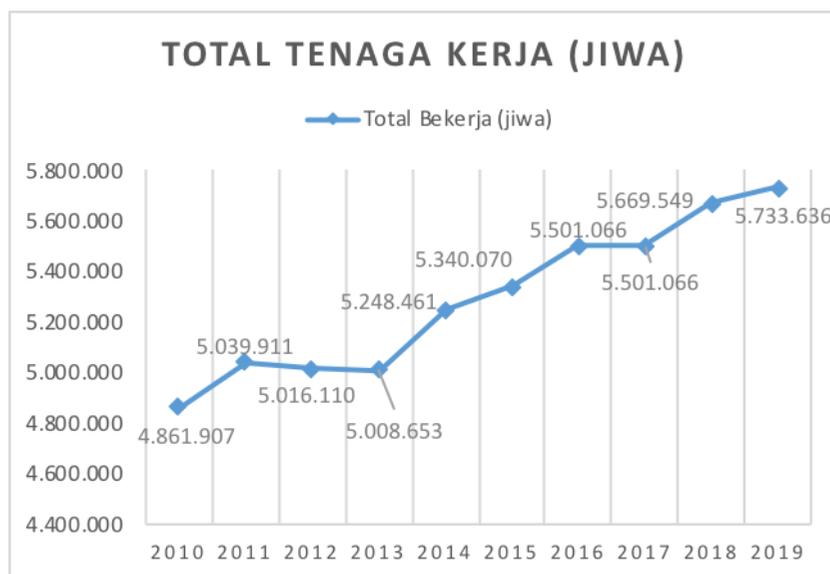
Total Nilai PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat Tahun 2010-2019

Gambar 1.1 menunjukkan data total nilai PDRB yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat pada tahun 2010 hingga 2019. Secara keseluruhan di sepuluh tahun terakhir rata-rata PDRB yang dihasilkan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Dapat dilihat pada grafik tersebut, bahwa setiap tahunnya PDRB yang didapatkan terus meningkat. Pada tahun 2010 nilai PDRB secara keseluruhan sebesar Rp227.901.870.000.000. Kemudian di tahun 2011 menjadi sebesar Rp242.542.650.000.000, lalu pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp257.508.940.000.000, setelah itu di tahun 2013 juga naik menjadi

Rp273.241.865.720.000 dan pada tahun 2014 nilai PDRB yang didapatkan sebesar Rp287.618.880.580.000.

Selanjutnya pada tahun 2015 nilai PDRB yang telah didapatkan mencapai angka tiga ratus triliun rupiah, yaitu menjadi sebesar Rp302.100.841.700.000. Kemudian di tahun 2016 hingga 2019 terus meningkat walaupun angka yang telah dicapai masih di sekitar tiga ratus triliun rupiah. Di tahun 2016 nilainya mencapai sebesar Rp317.827.085.320.000, lalu pada tahun 2017 sebesar Rp335.691.314.520.000 dan setelah itu tahun 2018 menjadi sebesar Rp353.286.214.310.000. Nilai PDRB yang telah didapatkan pada tahun 2019 hampir mencapai angka empat ratus triliun rupiah yaitu sekitar Rp370.867.747.940.000.

Menurut Teori Neo Klasik, tenaga kerja dan modal memiliki keterkaitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena terjadinya pertumbuhan ekonomi tersebut bergantung dengan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja dan teknologi. Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan faktor yang dapat menentukan laju pertumbuhan ekonomi baik perannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Tenaga kerja menjadi faktor penting dalam proses produksi dibandingkan sarana produksi lainnya (bahan baku, lahan, air dsb) karena tenaga kerja/manusia yang akan mengoperasikan semua produksi tersebut. Kemudian akan menghasilkan suatu barang yang bernilai untuk nantinya dapat menambah nilai PDRB di suatu daerah (Maisaroh and Risyanto, 2018).



Sumber: Data diolah, 2020

GAMBAR 1.2

Total Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat Tahun 2010-2019

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat pada tahun 2010 hingga 2019. Secara umum jumlah tenaga kerja pada sepuluh terakhir setiap tahunnya terus meningkat, walaupun ada di beberapa tahun jumlah tenaga kerja yang bekerja menurun. Pada tahun 2010 secara keseluruhan tenaga kerja yang bekerja mencapai 4.861.907 jiwa. Kemudian di tahun 2011 naik menjadi sebanyak 5.039.911 jiwa. Setelah itu pada tahun 2012 dan 2013 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan yang menjadi sebanyak 5.016.110 jiwa di tahun 2012 dan sebanyak 5.008.653 di tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan, namun masih di angka lima juta jiwa. Di tahun 2014 sebanyak 5.248.461 jiwa yang bekerja,

lalu di tahun 2015 sebanyak 5.340.070 jiwa dan tahun 2016 sebanyak 5.501.100 jiwa. Tahun 2017 merupakan jumlah tenaga kerja yang mengalami penurunan paling sedikit, yaitu menjadi sebanyak 5.501.066 jiwa. Kemudian pada dua tahun terakhir, tahun 2018 mengalami kenaikan pada jumlah yang bekerja sebanyak 5.669.549 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 5.733.636 jiwa.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi adanya pendapatan suatu daerah yang didapatkan dari PDRB dimana hal itu berhubungan dengan investasi. Investasi yang didapatkan dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi inilah akan menghasilkan faktor produksi, barang publik, pendidikan, infrastruktur dll. Tujuannya untuk menunjang kebutuhan masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi dan yang lebih utama mensejahterakan masyarakat apabila dikelola dan direalisasikan dengan baik.

TABEL 1.3

Total Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat
Tahun 2010-2019

Tahun	Investasi (rupiah)
2010	64.252.675.393.500
2011	64.734.076.729.400
2012	89.772.129.117.980
2013	111.907.277.225.660
2014	131.240.159.687.000
2015	164.260.391.198.390
2016	133.558.554.691.850
2017	153.289.136.051.800
2018	135.882.431.113.800
2019	270.728.606.100.000

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 sebelumnya, menunjukkan realisasi investasi (PMA dan PMDN) secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat pada tahun 2010-2019. Secara umum realisasi investasi menunjukkan kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2010 realisasi investasi sebesar Rp64.252.675.393.500. Kemudian pada tahun 2011-2015 investasi yang telah direalisasi terjadi kenaikan dan juga mencapai jumlah ratusan triliun rupiah. Tahun 2011 menjadi sebesar Rp64.734.076.729.400, lalu di tahun 2012 sebesar Rp89.772.129.117.980, setelah itu pada tahun 2013 telah mencapai jumlah ratusan triliun rupiah yakni sebesar Rp111.907.277.225.660. Pada tahun 2014 naik sebesar Rp131.240.159.687.000 dan tahun 2015 menjadi sebesar Rp164.260.391.198.390. Setelah itu tahun 2016 terjadi penurunan yaitu sebesar Rp133.558.554.691.850. Di tahun 2017-2019 terjadi fluktuasi dengan kenaikan sebesar Rp153.289.136.051.800 di tahun 2017, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp135.882.431.113.800 dan tahun 2019 mencapai kenaikan yang cukup besar yakni sebesar Rp270.728.606.100.000.

Menurut Sukirno (1999) menjelaskan tentang regulasi pemerintahan yaitu tentang pengeluaran pemerintah yang didapatkan dari pajak. Di negara-negara maju, pajak merupakan sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Seperti membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan diantaranya ada

belanja modal, belanja untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting.

Tujuan dari semua belanja pemerintah untuk pembangunan beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan tersebut nantinya akan meningkatkan pengeluaran agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara ataupun daerah. Dalam hal tersebut, belanja modal merupakan hal pokok untuk dikeluarkan yang dimana bagian itu merupakan pengeluaran pemerintah.

Belanja modal dikeluarkan bukan hanya untuk keperluan pemerintah semata akan tetapi juga untuk penunjang pembangunan ekonomi dan kedepannya dapat menghasilkan timbal balik sebagai tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Diharapkan pemerintah mengambil kebijakan yang adil dan saling menguntungkan baik itu untuk pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat demi kesejahteraan bersama.

TABEL 1.4
Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat Tahun
2010-2019

Tahun	Belanja Modal (rupiah)
2010	1.595.491.081.000
2011	1.448.269.295.000
2012	1.846.910.978.000
2013	2.770.972.737.000
2014	2.571.611.217.000
2015	2.549.416.141.000
2016	2.603.065.719.000
2017	2.908.171.555.000
2018	2.854.078.316.000
2019	3.686.439.529.670

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 1.5 menunjukkan data secara keseluruhan jumlah belanja modal dari pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat tahun 2010-2019. Secara umum jumlah belanja modal dari pemerintah mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 mencapai sebesar Rp1.595.491.081.000. Selanjutnya pada tahun 2011 hingga 2013 terjadi kenaikan yakni sebesar Rp1.448.269.295.000 di tahun 2011, lalu tahun 2012 sebesar Rp1.846.910.978.000 dan di tahun 2013 jumlah belanja modal terjadi kenaikan yang cukup besar hingga mencapai angka dua triliun rupiah yaitu sebesar Rp2.770.972.737.000. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan, namun tidak terlalu besar yaitu sebesar Rp2.571.611.217.000 di tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebesar Rp2.549.416.141.000. Setelah itu di tahun 2016 dan 2017 belanja modal yang dikeluarkan mengalami kenaikan mencapai Rp2.603.065.719.000 pada tahun 2016 dan di tahun 2017 sebesar Rp2.908.171.555.000. Kemudian di tahun 2018 terjadi penurunan namun terbilang masih tidak terlalu besar yakni sebesar Rp2.854.078.316.000. Di tahun 2019 merupakan pengeluaran belanja modal yang cukup besar karena telah mencapai tiga triliun rupiah yaitu terbilang sebesar Rp3.686.439.529.670

Keterkaitan pada penelitian ini tertuang dalam Surah At-Taubah (9): 34 berisi tentang larangan penimbunan harta yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Pada Surah At-Taubah: 34 ini menjadi pedoman dalam penelitian penulis, dalam Tafisr Jalalyn dijelaskan, (Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan) yakni mengambil (harta benda orang lain dengan cara yang batil) seperti menerima suap dalam memutuskan hukum (dan mereka menghalang-halangi) manusia (dari jalan Allah) dari agama-Nya. (Dan orang-orang) lafal ini menjadi muftada/permulaan kata (yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya) dimaksud ialah menimbunnya (pada jalan Allah) artinya mereka tidak menunaikan hak zakatnya dan tidak membelanjakannya ke jalan kebaikan (maka beritahukanlah kepada mereka) beritahukanlah kepada mereka (akan siksa yang pedih) yang amat menyakitkan.

Surah tersebut juga mengacu pada sistem ekonomi Islam yang melarang individu mengumpulkan harta secara berlebihan. Sebab, dengan adanya pengumpulan harta secara berlebihan berakibat pada berhentinya roda perekonomian. Oleh karena itu, penimbunan merupakan perilaku yang dilarang dalam ajaran Islam (Yuniarti, 2016).

Pada penjelasan sebelumnya, tentang teori-teori dan pedoman yang melatarbelakangi pada penelitian ini tidak sebatas itu saja. Tetapi perlu juga jurnal-jurnal acuan untuk penelitian ini. Dalam penelitian Putri (2014)

menjelaskan bahwa modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi yang direalisasikan maka dapat menciptakan barang modal yang baru sehingga dapat menyerap faktor produksi baru, seperti terciptanya lapangan pekerjaan baru ataupun kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja terserap maka pengangguran akan berkurang. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut dan melalui perkembangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, di buatlah penelitian ini dengan judul *“Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat Tahun 2010-2019”*.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, hanya terkait pada judul Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, PMA, PMDN dan Belanja Modal Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat Tahun 2010-2019. Dengan variabel dependen adalah Produk Domestik Regional Bruto dan variabel independennya Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat pada Tahun 2010-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat pada tahun 2010-2019?
2. Apakah PMA berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat pada tahun 2010-2019?
3. Apakah PMDN berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat pada tahun 2010-2019?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat pada tahun 2010-2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat pada tahun 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat pada tahun 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh PMDN terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat pada tahun 2010-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Selatan dan Barat pada tahun 2010-2019.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk para peneliti lainnya yang mempunyai penelitian atau masalah yang sama namun dengan variabel yang berbeda.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai perekonomian khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide dan informasi terkait dari beberapa variabel penelitian ini untuk kedepannya dapat menghasilkan kebijakan yang tepat untuk pembangunan ekonomi khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.